

KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (PERDAGANGAN NARKOBA INTERNASIONAL) DI KEPULAUAN RIAU (2012-2017)

Azrul Asyikin
Dr. Sidik Jatmika.,M.Si.

Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan mengapa Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama bilateral dalam menangani kejahatan transnasional di Kepulauan Riau. Dengan luas wilayah laut yang dominan, Indonesia menjadi ancaman peredaran narkoba secara masif, karena sindikat jaringan pedangang narkoba internasional memanfaatkan 80 persen jalur laut untuk mendistribusikan hasil produksi mereka. Salah satu yang diawasi adalah wilayah Kepulauan Riau, karena provinsi ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional, oleh karena itu, Indonesia diwakili oleh Polri dan Malaysia oleh PDRM melakukan kerjasama untuk memberantas narkoba dengan berbagai macam kesepakatan dan perjanjian

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Polri, PDRM, Perdagangan Narkoba Internasional, Narkoba

This thesis was written to explain why Indonesia and Malaysia had bilateral cooperation in transnational crime at in Kepulauan Riau. Indonesia as an archipelago of the country with a vast sea area has to fight the massive threat of drug trafficking. It is because the illegal drug trafficking syndicate is distributing their products by the sea route. One of their routes is Kepulauan Riau. This province is adjacent to Malaysia and faces Malacca Straits which is an international trade route. Therefore, Indonesian representatives, Polri, and Malaysia representatives, PDRM has to collaborate to eradicate drug trafficking using international agreements.

Keywords: Indonesia, Malaysia, Polri, PDRM, drug trafficking, drugs

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terletak Asia Tenggara dan juga berada di garis khatulistiwa. Indonesia sendiri diapit oleh dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia kemudian Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 Pulau yang menjadikan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia sendiri terdiri dari 34 Provinsi. Muslim menjadi agama mayoritas di negara ini dan menyusul Kristen, Hindu, Budha dan juga Konghucu menjadi agama resmi di Indonesia.¹

Indonesia berbatasan langsung dengan banyak negara, diantaranya adalah Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Filipina, Australia dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India². Hal ini lah yang menjadikan Indonesia banyak melakukan kerjasama internasional dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan dari negara Indonesia itu sendiri. Diantaranya adalah melakukan kerjasama bilateral dengan Malaysia Hingga saat ini Indonesia dan Malaysia telah melakukan banyak kerjasama bilateral untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan

¹Portal Informasi Indonesia, *Geografis Indonesia*, Portal Informasi Indonesia, diakses di

http://indonesia.go.id/?page_id=479 pada tanggal 25 September 2018 pukul 22.05 WIB

² Ibid

nasional masing-masing negara. Kerjasama Indonesia dan Malaysia dilakukan di berbagai macam bidang, diantaranya yakni bidang ekonomi, perlindungan tenaga kerja, perbatasan dan khususnya dalam bidang keamanan³. Dalam bidang keamanan sendiri, Indonesia-Malaysia melakukan kerjasama dalam menangani kasus kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba internasional.

Walaupun pada kenyataan hukum setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing, tetapi itu tidak membuat negara-negara yang berdekatan menjadi terpisah lalu terputus hubungannya, sebaliknya dikarenakan mereka saling berdekatan, oleh karenanya mereka saling mempengaruhi satu sama lain, dan tidak ada jalan lain selain untuk menjalin kerjasama⁴.

Kejahatan transnasional sendiri adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan melampaui batas-batas negara, Konsep kejahatan transnasional sendiri mulai ada pada tahun 1990-an, kala itu diperkenalkan di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang pencegahan kejahatan. Kejahatan transnasional sendiri memiliki banyak jenis, diantaranya adalah perdagangan manusia, korupsi, perdagangan narkoba dll⁵. Khususnya kejahatan perdagangan narkoba lintas batas atau lintas negara harus menjadi perhatian penting bagi Indonesia dan Malaysia.

Di dekade terakhir, perkembangan teknologi komunikasi, komputer dan informasi yang secara cepat dan maju dapat berpengaruh di dalam persoalan politik dan keamanan suatu negara, dimana saat ini

perkembangan teknologi tidak lagi dibatasi dengan jarak dan waktu, seperti aplikasi foto satelit penginderaan contohnya *Google Earth* dapat membantu untuk kemudahan segala aspek kehidupan baik positif maupun negatif⁶. Seperti halnya kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba internasional, para perilaku memanfaatkan teknologi ini untuk memperoleh informasi secara spesifik mengenai tempat, jalur pengiriman yang aman, dan juga mengetahui hal-hal yang bisa mereka hindari untuk lari dari kejaran pihak keamanan.

Perdagangan narkoba internasional dikatakan sebagai isu global yang harus menjadi perhatian adalah karena termasuk kedalam empat indikator, yaitu:

1. negara-negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap isu perdagangan narkoba intrnasional, bahkan banyak negara yang membuat regulasi khusus dalam menangani kejahatan ini;
2. Isu kejahatan perdagangan narkoba internasional, terus diliput oleh pers internasional, seperti mafia-mafia di Tiongkok, dan juga kasus narkoba di Eropa Timur;
3. Isu ini sudah menjadi subyek penelitian, dan juga subyek pembelajaran oleh para ilmuwan di seluruh dunia;
4. Narkoba telah menjadi isu penting yang dibahas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dibuktikan dengan dibentuknya badan khusus untuk mengawasi peredaran narkoba *yakni*

³ Arga Sumantri, "Indonesia-Malaysia Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang" diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/asia/5b25XlaN-indonesia-malaysia-tingkatkan-kerja-sama-di-berbagai-bidang>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 23.45 WIB

⁴ Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations (New York :Oxford University Press Inc, 1999), hal.2

⁵Vinsensius Richard Liu, "Efektifitas Interpol Dalam Penanggulangan Jaringan NarkobaDiIndonesia"diaksesdari<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4799/jurnal.docx?sequence=1> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.45

⁶ Elisabeth, Adriana, et al., Politik Luar Negeri Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.142-143

*United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)*⁷.

Dari data yang ada narkoba memberi ancaman yang serius bagi dua negara ini terkhusus Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data yang ada. Menurut data terakhir BNN pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 1,77% atau 3.3 juta jiwa, dengan kerugian negara mencapai 84,7 triliun rupiah dan kerugian pribadi sebesar 7,1 triliun rupiah dan kemudian narkoba juga mengakibatkan kematian yakni sudah diperkirakan sekitar 11.071 jiwa pertahun dan 30 orang perhari. Dari seluruh pemakai zat berbahaya ini, pekerja menjadi pemakai terbesar dengan persentase 59% diikuti pelajar 24% dan populasi umum sebanyak 17%⁸.

Hal ini dikarenakan, bagi setiap negara pelajar dan juga sebagai pemuda merupakan aset bangsa yang sangat penting untuk kehidupan keberlanjutan negara. Khususnya Kepulauan Riau harus menjadi perhatian, karena provinsi ini terletak di perbatasan negara, dan berada didepan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Dengan sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) menjadikan Kepulauan Riau sebagai sasaran empuk untuk menyelundupkan narkoba.

Luas wilayah Kepulauan Riau sendiri sebesar 252.601 Km² dimana 96 % merupakan laut dan 4% adalah daratan.

Provinsi ini adalah provinsi yang letaknya paling depan dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dan juga berhadapan langsung dengan Selat Malaka yakni jalur perdagangan internasional yang paling sibuk didunia⁹. Hal ini pula yang membuat daerah ini rentan akan kejahatan transnasional, khususnya peredaran dan penjualan narkoba

Dalam rentang waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, Kepulauan Riau menjadi daerah yang rentan dalam kasus kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba. Melalui bandara, kemudian pelabuhan internasional, penyeludupan narkoba dilakukan oleh oknum-oknum jaringan sindikat internasional maupun secara perorangan. Pada tahun 2012, jumlah kasus berdasarkan sumber dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada tahun 2012, adalah sebanyak 288 kasus dengan 381 tersangka¹⁰. Kemudian ditahun 2013 terdapat 114 kasus¹¹. Kemudian selanjutnya di tahun 2014 terdapat 324 kasus¹². Dan di tahun 2015 terdapat 514 kasus¹³.

Dari sekian banyak kasus, transaksi atau asal narkoba tersebut merupakan distribusi dari luar negeri salah satunya Malaysia¹⁴. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi dua negara ini dalam menangani kasus peredaran dan penjualan narkoba antar Negara, karena hal ini akan menyebabkan

⁷ Budi Winarno. "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer" (Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service, 2014), hal.396-397

⁸Berita Satu. "1,77% Penduduk Gunakan Narkoba, Kerugian 84,7 Triliun" diakses dari <http://www.beritasatu.com/nasional/483883-177-penduduk-gunakan-narkoba-kerugian-rp-847-triliun.html>. pada tanggal 24 November 2018 pukul 13.00 WIB

⁹ Ade P Nasution, "Profil Provinsi Kepulauan Riau" diakses dari <http://adenasution.com/2012/05/29/profil-provinsi-kepulauan-riau/> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.59 WIB

¹⁰Angga Indrawan, " Kasus Narkoba di Kepri Meningkat" Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/0>

3/06lyqe365-kasus-narkoba-di-kepri-meningkat pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 03.40 WIB

¹¹ Simela Victor Muhamad, "Kejahatan Transnasional Penyeludupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat" diakses dari

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 22.46 WIB

¹² Angga Indrawan, Loc.cit

¹³ Simela Victor Muhamad, Loc.cit

¹⁴Hadi Maulana "BNN Kepri Amankan 2,5 Kilogram Sabu Asal Malaysia yang Dibawa TKI",diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/03/22/16384861/bn-n-kepri-amankan-25-kilogram-sabu-asal-malaysia-yang-dibawa-tki>, pukul 01.19 WIB

banyak keburukan bagi kedua negara tersebut.

PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Indonesia Dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia secara resmi menjalin hubungan pada tahun 1957, saat itu Malaysia masih disebut dengan nama Tanah Melayu yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris¹⁵. Indonesia merupakan salah satu diantara negara pertama yang membuka hubungan diplomatik terhadap Malaysia¹⁶. Namun hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia penuh dengan dinamika, naik turun dalam hubungan terus terjadi di setiap era kepemimpinan masing-masing Presiden.

A. Era Konfliktual

1. Era Pemerintahan Soekarno

Era pemerintahan Soekarno adalah era dimana Indonesia memulai kerjasama dengan Malaysia, tepatnya di tahun 1957. Sejak hubungan di mulai hingga digantikannya Soekarno sebagai presiden hubungan Indonesia dan Malaysia diwarnai dengan naik turun intensitas keharmonisan, dan menjadi lebih sedikit buruk ketika memasuki 4 tahun terakhir sebelum Soekarno tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia¹⁷.

Berawal dari berbeda haluannya kedua negara dalam penentuan arah politik internasional, Indonesia dengan Soekarno yang lebih mengarah ke blok komunis dan Malaysia dengan Tunku Abdul Rahman yang mengarah ke blok Kapitalis membuat dua negara ini sedikit mengalami berbagai macam ketegangan. Seperti saat Indonesia membutuhkan dukungan Malaysia untuk mempertahankan Irian Barat, Malaysia

lebih memilih untuk abstain, yang kemudian membuat Soekarno saat itu menjadi marah terhadap Perdana Menteri Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman¹⁸.

Kemudian di tahun 1963 hubungan buruk antara kedua negara terus terjadi saat akan dibentuknya negara Federasi Malaysia yang akan mempersatukan bagian Sabah dan Serawak dengan Tanah Melayu. Soekarno menganggap itu sebagai suatu penjajahan bentuk baru yang dilakukan oleh Inggris dan menentang keras rencana dibentuknya Negara Federasi Malaysia, dan yang menjadikan Soekarno benar-benar marah adalah ketika Soekarno tidak diberitahukan rencana Penyatuan Sabah dan Serawak dengan Tanah Melayu menjadi Negara Federasi Malaysia.

Ketegangan ini terus berlanjut ketika Soekarno mencoba untuk membuat Malaysia menjadi terprovokasi dengan mengancam akan melakukan segala upaya untuk membuat gagal pembentukan Negara Federasi Malaysia. Hubungan kedua negara kemudian diperparah dengan aksi konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia dengan keluarnya slogan “Ganyang Malaysia”¹⁹.

Istilah ”ganyang Malaysia” adalah istilah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno yang kemudian dipopulerkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Soebandrio di tanggal 20 Januari 1963. Istilah itu juga dipertegas saat Soekarno mulai kegusaran terhadap demonstran yang dilakukan oleh rakyat Malaysia di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur tahun 1963 dimana para pendemo merobek foto Soekarno dan kemudian lambang Negara

¹⁵ Maksum, Ali. “*Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia*”. (Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13

¹⁶ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “*Malaysia-Indonesia Miliki Hubungan Sejarah Kuat*”. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesia-miliki->

[hubungan-sejarah-kuat/#more-2682](https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesia-miliki-hubungan-sejarah-kuat/#more-2682) Pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 23.22 WIB

¹⁷ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

¹⁸ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

¹⁹ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

Indonesia Garuda Pancasila dibawa ke depan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, dan kemudian demonstran meminta Tunku Abdul Rahman untuk menginjak lambang Garuda²⁰.

Dalam usahanya melakukan Konfrontasi Indonesia dengan dipimpin Soekarno membentuk Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) dan kemudian mengirimkan Tentara Nasional Indonesia ke perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Konfrontasi ini dilakukan secara senyap tanpa pemberitaan resmi dari kedua negara yang bersangkutan²¹.

Pertempuran yang terjadi di perbatasan Kalimantan adalah pertempuran kecil-kecilan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Inggris yang menjadi sekutu Malaysia. Konfrontasi kemudian berakhir ketika Soekarno digantikan oleh Soeharto dalam menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia. Korban dalam pertempuran ini memakan korban dari kedua belah pihak, sekitar 590 orang di pihak Indonesia dan pihak Inggris dan sekutu sebanyak 114 orang.

2. Era Pemerintahan Soeharto

Dalam era Soeharto konflik antara Indonesia dengan Malaysia tidak terlalu tegang saat Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Tetapi sedikit banyak hubungan Indonesia dan Malaysia di era kepemimpinan Soeharto terdapat perselisihan yang terjadi.

Salah satunya ketika di tahun 1980 an di akhir era perang dingin, politik luar negeri Indonesia dan Malaysia mengalami perubahan, dikarenakan penyesuaian terhadap situasi internasional pasca perang dingin antara

Amerika dan Rusia. Secara tidak langsung Indonesia dan Indonesia terlibat rivalitas. Kemajuan pembangunan dua negara yang terbilang kontras menjadi awal mulanya rivalitas tersebut. Indonesia dan Malaysia juga mencoba bersaing untuk mendapatkan kedudukan di institusi internasional seperti di Gerakan Non Blok (GNB), dialog antara Utara dan Selatan juga dialog Selatan dengan Selatan²².

Hubungan diplomatik kedua negara sedikit memburuk ketika Indonesia dianggap Malaysia memiliki citra buruk, salah satunya adalah karena Indonesia sebagai negara yang sering mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal dan juga buruh kasar. Di sisi lainnya, dengan adanya TKI di Malaysia, menjadi pengganggu stabilitas dalam negeri, contohnya adalah keterlibatan terhadap “pendatang haram” dalam berbagai kriminal.

3. Era Pemerintahan BJ Habibie

Di era kepemimpinan BJ Habibie, perubahan sikap terjadi oleh Indonesia terhadap Malaysia, dimana pihak Malaysia menuduh Indonesia mencampuri situasi dalam negeri Malaysia. salah satu sumber ketegangan antara kedua negara adalah ketika para pemimpin Indonesia memberikan komentar-komentar terhadap kasus penangkapan dan juga pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Deputy Perdana Menteri Malaysia.

Dalam kasus tersebut, Malaysia menganggap BJ Habibie terlalu mencampuri dengan mengomentari terlalu dalam atas kasus tersebut. Tentunya pihak Malaysia menjadi gusar terhadap tindakan pemimpin Indonesia tersebut,

²⁰ Susanto Pudjomartono. “*Ganyang Malaysia?*”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/08/08135067/Ga>

nyang.Malaysia pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 19.16 WIB

²¹ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 16

²² Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 23-25

tentunya hal itu kembali memanas hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia²³.

4. Era Pemerintahan Megawati

Di era pemerintahan Megawati, konflik yang paling mendapatkan perhatian adalah ketika Indonesia kalah dalam persidangan di Mahkamah Internasional terhadap perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah pulau yang letaknya berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di bagian Kalimantan Timur untuk Indonesia dan di bagian Sabah untuk Malaysia. Persengketaan ini mulai terjadi ketika pembahasan batas kontinen bagi kedua negara yakni pada tahun 1969. Hal yang kemudian sangat menjadi penting bagi kedua negara ini adalah Pulau Sipadan dan Ligitan dijadikan sebagai titik baselines untuk diambil batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)²⁴.

Kemudian di tahun 1996 terjadi perundingan oleh pihak dari kedua negara, diwakilkan langsung oleh kedua Presiden, Soeharto dan Tun Mahatir melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati bahwa kasus Sipadan dan Ligitan akan dibawa ke Mahkamah Internasional, dua tahun setelah pertemuan ini, tepatnya ditahun 1998 kasus Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional²⁵.

Setelah melalui proses panjang, di akhir tahun 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa yang memenangkan kasus ini adalah Malaysia dengan dasar otoritas yuridis, administratif, legislatif yang berkelanjutan oleh Malaysia dan juga

sebagai negara pewaris dari konolial Inggris²⁶.

Hasil keputusan ini sangat membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi sangat tidak harmonis, sebagian besar pihak Indonesia tidak menerima keputusan yang telah ditetapkan dan mengkritik keras Presiden saat itu yakni Megawati Soekarno Putri, walaupun Megawati bukanlah yang memutuskan penyelesaian kasus ini, pemerintahan Megawati tetap menjadi sasaran kritik seluruh elemen masyarakat Indonesia, terkhusus para politisi²⁷.

5. Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Setahun setelah memimpin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan dengan permasalahan yang serius, yaitu terkait dengan Blok Ambalat. Sengketa Blok Ambalat terjadi di tahun 2005, sengketa ini terjadi adalah akibat dari semakin meluas wilayah Malaysia setelah Malaysia memenangkan kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.

Sengketa Blok Ambalat mulai memanas ketika Malaysia menentukan konsesi eksplorasi minyak di Blok Ambalat, sementara wilayah tersebut masih dalam status konflik karena diklaim oleh Indonesia dan Malaysia sejak 1979 yang tidak diterima oleh pihak Indonesia. Indonesia mengklaim Blok Ambalat adalah berdasarkan Perjanjian antara Inggris dan Belanda tahun 1981²⁸.

Kemudian pertemuan di tahun 2006, sedikit mengurangi ketegangan antara kedua negara, kedua negara mencoba diskusi dan memanfaatkan wilayah sengketa dengan menjadikan Blok Ambalat menjadi wilayah potensi

²³ Maksum, Ali, Op.cit., hlm, 26-27

²⁴ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Keamanan Asia Tenggara (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hal.4-5

²⁵Ibid., hlm 92-93

²⁶Ibid

²⁷Ibid

²⁸Ibid

ekonomi yang produktif. walaupun tidak adanya suatu yang baru dari sengketa Blok Ambalat, itu merupakan pertemuan yang pertama kali membahas tentang kemungkinan *Joint Development* di dalam wilayah sengketa²⁹.

Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terdapat beberapa kasus yang terkait dengan TKI di Malaysia, seperti dianiaya oleh majikan, hingga kasus bunuh diri³⁰.

Di era SBY Jilid II, tahun 2009 konflik Blok Ambalat kembali terjadi, kapal perang Malaysia sering memasuki perairan Ambalat dan kemudian, pernah terjadi kejar-kejaran antara kedua kapal perang Indonesia dan Malaysia selama 1,5 Jam yang kemudian kapal perang Indonesia berhasil mengusir keluar kapal perang Malaysia. Indonesia juga sempat melakukan gelar pasukan dan mengirimkan tujuh kapal perang ke perairan Ambalat.

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2010, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas ketika ditangkapnya tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi laut Malaysia. kasusnya adalah saat itu ketiga petugas itu menangkap tujuh orang nelayan ilegal berasal dari Malaysia, perlakuan buruk didapat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut³¹.

6. Era Pemerintahan Jokowi

Dalam pemerintahan Jokowi, masalah TKI menjadi isu utama permasalahan bagi kedua negara. Sejak dilantikannya Jokowi ditahun 2014, sudah cukup banyak kasus yang terjadi terhadap

TKI di Malaysia. Penganiayaan, dijadikan budak untuk dijual, dan berbagai macam lainnya. Contoh kasus yang melibatkan kedua negara adalah ketika seorang TKI terlibat kasus narkoba dan pengadilan Malaysia memvonis hukuman mati terhadap TKI tersebut dikarenakan telah menyelundupkan narkoba, pihak Indonesia berupaya untuk membantu dan mengadvokasi TKI tersebut, tetapi pihak Malaysia tetap terus melaksanakan vonis pengadilan³².

B. Era Kerjasama

Dalam hubungan diplomatik antar dua negara, tentunya pasti akan memiliki permasalahan-permasalahan, terutama bagi Indonesia dan Malaysia yang memiliki batas laut dan udara secara langsung. Namun di dalam hubungan itu pula, tentunya didominasi kerjasama-kerjasama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk perkembangan masing masing negara.

1. Era Pemerintahan Soekarno

Dalam era pemerintahan Soekarno prestasi paling besar adalah dibangunnya hubungan diplomatik oleh Soekarno dengan Malaysia pada saat pertama kali Malaysia merdeka dan saat itu masih bernama Tanah Melayu. Sebenarnya Indonesia semangat dengan merdekanya saudara serumpunnya, yakni Tanah Melayu, karena pada saat itu semangat “Nasionalisme” menjadi penguat antara para pemuda-pemuda Indonesia dan Malaysia untuk melawan penjajahan saat itu³³.

2. Era Pemerintahan Soeharto

Menurut Tun Mahatir dan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, era Pemerintahan Soeharto adalah masa

²⁹Ibid

³⁰Maksum, Ali, Op.cit., hlm.30-32

³¹ Mohammad Rosyidin. “*Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan*

Tahun 2010”. Jurnal Kajian Wilayah LIPI, Vol. 5, No.1, 2014, hal 3

³² Ali Maksum. “*Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi*”. Jurnal PIR, Vol.2, No.1, 2017

³³ Maksum, Ali, Op.cit., hlm.30-32

Keemasan hubungan Indonesia dan Malaysia, hal ini dipertegas karena setelah terjadinya konfrontasi, hubungan Indonesia dan Malaysia cenderung terus membaik.

Soeharto merupakan sosok yang sangat dekat dengan Malaysia, dan berhasil kembali membawa hubungan Indonesia dan Malaysia kembali harmonis, momentumnya adalah ketika dilakukannya perjanjian untuk menormalisasi hubungan kedua negara pasca konfrontasi di Bangkok pada 11 Agustus 1966, Indonesia diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Pertahanan Malaysia.

Perbaikan hubungan Indonesia dan Malaysia berdampak kepada integrasi negara-negara Asia Tenggara, yakni dengan pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di tahun 1967. Semakin lama hubungan Indonesia dan Malaysia semakin harmonis, dibuktikannya dengan berbagai macam kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara, salah satunya adalah dibidang pendidikan, Indonesia mengirimkan guru dan dosen berjumlah 17 orang untuk membantu Malaysia mendirikan universitas nasional yang sekarang dikenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) di tahun 1970³⁴.

3. Era Pemerintahan Megawati

Kerjasama yang terjadi di era kepemimpinan Megawati adalah ketika mulai terjadinya perubahan terhadap politik internasional setelah serangan 11 September 2001 di gedung WTC New York, Amerika Serikat. Kedua negara

sama-sama waspada terhadap ancaman teroris dan salah satu hasil kerjasamanya adalah kerjasama *Malaysia-Indonesia Coordinated Patrol (Malindo Corpat)* yang kemudian ditanda tangani di tahun 2004 untuk menjaga Selat Malaka³⁵.

4. Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Di era pemerintahan SBY Jilid I, kerjasama Indonesia dan Malaysia sudah mulai dan disepakati di tahun 2006, ketika Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melakukan kunjungan ke Istana Negara Bung Hatta di Sumatera Barat. Kesepakatan dilakukan untuk kemajuan diberbagai bidang³⁶.

Seperti bidang ekonomi, keamanan, dan juga pendidikan, dan juga pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus melakukan perundingan terkait menentukan batas wilayah darat maupun laut. Kesepakatan lainnya adalah terkait dengan maraknya kasus terorisme, salah satu menjadi instrumen kerjasama ini adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan juga Polis Diraja Malaysia (PDRM)³⁷.

Kemudian kerjasama Indonesia dan Malaysia di era Pemerintahan SBY Jilid II merupakan lanjutan dari kerjasama Indonesia dan Malaysia jilid I, hal ini karena setiap kerjasama yang dilakukan adalah hasil pertemuan tahunan antar kedua pemimpin negara.

Isu ekonomi dan Investasi dan terutama isu TKI menjadi perhatian bagi kedua negara khususnya Indonesia. pertemuan tahunan menjadi andalan bagi Indonesia dan Malaysia dan juga dirasa efektif untuk memastikan

³⁴ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 20-22

³⁵ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 28

³⁶ Detik News. "RI-Malaysia Sepakati Kerjasama di Segala Bidang". Diakses dari

<https://news.detik.com/berita/517625/ri-malaysia-sepakati-kerjasama-di-segala-bidang-pada-tanggal-15-februari-2019-pukul-22.39-wib>

³⁷ Ibid

kesinambungan kerjasama bagi kedua negara³⁸.

5. Era Pemerintahan Jokowi

Dalam hal kerjasama Indonesia dan Malaysia di awal pemerintahan Jokowi, diprioritaskan tiga bidang dalam kerjasama, pertama tentang Buruh Migran Indonesia (BMI). Permasalahan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia karena tingginya tingkat kasus di Malaysia yang terkait dengan Buruh Migran Indonesia. Diketahui di Malaysia terdapat 2,5 juta jiwa warga Indonesia di Malaysia, setengahnya adalah buruh migran yang berstatus ilegal³⁹.

Kemudian perundingan masalah perbatasan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi. Kedua negara menyetujui untuk kemudian melakukan negosiasi secara rutin. Dalam hal ini Indonesia dan Malaysia akan mendiskusikan *roadmap* untuk pertemuan perundingan secara langsung. Yang ketiga adalah, peningkatan kerjasama ekonomi, dalam hal ini Malaysia merupakan negara dengan peringkat ke-5 terbesar sebagai negara yang berinvestasi di Indonesia sekaligus juga sebagai mitra dagang. Di data tahun 2014, investasi Malaysia di Indonesia senilai 711 juta dolar AS dan akan diperkirakan akan terus tumbuh⁴⁰.

KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PENANGANAN NARKOBA

A. Upaya ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara

ASEAN mulai menjadikan narkoba sebagai musuh yang harus dihadapi secara serius sejak tahun 1972 dalam kesepakatan di *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* di ibukota negara Filipina. Lalu dilanjutkan 4 tahun kemudian untuk menindak lanjuti pertemuan tersebut di tahun 1976 yang dinamakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* di Singapura yang dibuktikan dengan disepakatinya beberapa kesepakatan dari pertemuan tersebut yaitu :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba;
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba;
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional;
4. Kerjasama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional⁴¹.

Selain itu kerjasama-kerjasama yang dilakukan dalam lingkup ASEAN sudah di wadah dalam satu wadah yakni *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). ASOD merupakan wadah yang dibentuk saat *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) di pertemuan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* dan diresmikan pada tahun 1984. Dalam kerjanya ASOD memiliki 3 nam tugas pokok atau tugas utamanya.

³⁸ BBC. "Indonesia dan Malaysia Kawal Kerjasama Strategis". Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131219_ri_malaysia_pertemuan pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 23.08 WIB

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Devi Angraini. "Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara". Jurnal Fisipol Unair. Diakses dari <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf> pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 19.35 WIB

Selain ASOD, ASEAN membuat kebijakan baru terkait penanganan kejahatan perdagangan narkoba, yakni di kukuhkannya *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), lanjutan dari dikukuhkan AMMTC ASEAN terus memberikan porsi perhatian yang besar terhadap kejahatan perdagangan narkoba. Dan yang terakhir adalah kesepakatan yang terjadi ketika pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN pada tahun 1998 yang berisi untuk mewujudkan Drug-Free ASEAN, dalam kesepakatan ini berisi penegasan untuk kembali melakukan program-program dan prioritas kerja sama ASEAN yang berisi beberapa point, yakni mengurangi permintaan terhadap narkoba, dan mengurangi persediaan dan kemudian memberantas produksi, proses, dan distribusi di ASEAN hingga 2020⁴².

Namun kemudian Drug-Free ASEAN direvisi menjadi tahun 2015, perubahan ini terjadi di pertemuan di kongres internasional di Bangkok-Thailand pada tahun 2000. Dimana para pemimpin ASEAN menyadari bahwa peredaran narkoba dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kestabilan kawasan ASEAN, dan setelah perubahan waktu dari 2020 ke 2015 terkait Drug-Free ASEAN, ASEAN kemudian membentuk kerangka kerja menyatukan kinerja secara nasional bagi negara anggota ASEAN untuk penumpasan perdagangan narkoba internasional⁴³.

B. Pandangan Indonesia dan Malaysia Terhadap Kejahatan Transnasional (Perdagangan Narkoba Internasional)

1. Perspektif Indonesia

Dalam menghadapi isu kejahatan transnasional, Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap kejahatan lintas batas, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang letaknya sangat strategis khususnya di Asia Tenggara. Indonesia sendiri masuk kedalam organisasi *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)⁴⁴.

Bagi Indonesia, narkoba merupakan sebuah ancaman tradisional yang dapat menyebabkan terancamnya kehidupan bernegara suatu bangsa, yang kemudian dapat merusak dan mengganggu ketahanan nasional terutama di aspek sosial, budaya dan ekonomi⁴⁵. Oleh karena itu, melihat negara produsen, pelaku distribusi atau pengirim narkoba dari luar Indonesia merupakan berasal dari berbagai negara, tentunya Indonesia tidak bisa sendiri dalam melakukan penanganan, perlu melakukan kerjasama internasional guna memberantas perdagangan narkoba lintas batas. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan dan Indonesia telah menetapkan darurat narkoba dan membutuhkan upaya khusus dalam melakukan penanganannya⁴⁶.

Dalam menangani kasus perdagangan narkoba internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa hasil konvensi anti narkoba, yaitu :

- Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No.8 Tahun 1976;

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Kemenlu, "Kejahatan Lintas Negara" Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara->

Teroganisir.aspx. Pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 02.55 WIB

⁴⁵ Wisnu Aditya, Skripsi : "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba" (Yogyakarta: UPN Yogyakarta, 2017), Hal. 35

⁴⁶ Kemenlu, Loc.it

- Convention on Psychotropic Substances 1971 melalui UU No.8 Tahun 1996;
- Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997.

Untuk di tingkat multilateral, Indonesia tergabung dengan berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs*, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* dan beberapa pertemuan lainnya dibawah arahan UNODC⁴⁷.

2. Perspektif Malaysia

Sementara bagi negara Malaysia, narkoba dianggap telah menjadi ancaman yang sangat serius, dan pada tanggal 19 Februari 1983, YAB Perdana Menteri Malaysia menetapkan bahwa narkoba adalah “Musuh Nomor Satu Negara”. Kemudian dibuktikan dengan dikeluarkan kebijakan anti narkoba yaitu Akta Dadah Berbahaya 1952, dimana kebijakan tersebut mengatur tentang sanksi bagi pemilik dan pengedar narkoba.

Kemudian di tahun 1996, dengan digabungkannya *Pasukan Petugas Anti Dadah* (PPAD) dengan *Bahagian Rawatan dan Pemulihan* (BRPD) yang dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN)⁴⁸. Selain itu, Malaysia juga memiliki Pasukan Taktikal dan Perisikan Narkotik (Speial Tactics and Intelligence Narcotics Group) yang merupakan salah satu hasil dari langkah progresif dari pihak keselamatan Malaysia⁴⁹.

Malaysia telah menghabiskan puluhan juta ringgit per tahunnya dalam melaksanakan program penanganan kasus narkotika, namun disetiap

tahunnya kasus tentang narkoba tidaklah menurun. Malaysia memiliki strategi yang berdasarkan dasar narkoba negara, yaitu :

1. Strategi penguatkuasaan Undang-Undang ;
2. Strategi Pencegahan, Pendidikan dan Publisasi;
3. Strategi Rawatan dan Pemulihan;
4. Strategi Kerjasama Antarabangsa.

Selain itu Malaysia merupakan salah satu negara yang paling ketat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang terkait dengan kasus narkotika, Malaysia adalah satu dari 14 negara yang memberikan hukuman mati terhadap pelaku yang terlibat dengan kasus narkoba⁵⁰.

C. Kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Penanganan Perdagangan Narkotika Internasional

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia adalah pihak yang membangun kerjasama terkait permasalahan yang terjadi, baik melakukan penindakan ataupun pencegahan. Kemudian, hasil dari kesepakatan akan diteruskan oleh Institusi Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Agensi Antidadah Kebangsaan (AAK) menjadi pihak yang paling depan dalam menangani kasus peredaran narkoba di kedua negara ini.

1. Kerjasama Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM)

Kerjasama antara Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) diawali ketika pertemuan ASEANAPOL yang ke-25

⁴⁷ Kemenlu, Loc.it

⁴⁸ Wisnu Aditya, Loc.it.,Hlm. 35

⁴⁹ Khairudin Mohdz Zain. “Ubah Strategi Tangani Dadah” .Diaksesdari

<http://www.utusan.com.my/rencana/utama/ubah-strategi-tangani-dadah-1.332911> pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 09.30 WIB

⁵⁰ Khairudin Mohdz Zain. Loc.it.

di Bali tanggal 16-20 Mei 2005, disaat yang bersamaan terjadi kesepakatan antara POLRI dan PDRM dan kemudian menandatangani Nota Kesepahaman yang memiliki isi :

1. Pertukaran Informasi;
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal;
3. Bekejasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional;
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan;
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan;
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan;
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya;
8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru;
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman;

10. Bantuan dalam investigasi *money laundering*;

11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba dan operasi-operasi anti bahan berbahaya;

12. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkoba dan bahan berbahaya lainnya dimana kerjasama yang dilakukan telah diatur didalam Protokol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba, dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta peningkatan kerjasama Kepolisian⁵¹.

Pertama kerjasama antara Polisi Republik Indonesia dan Polis Diraja Malaysia adalah kerjasama *police to police* yang berarti kerjasama ini melakukan pertukaran dalam hal terkait pelaku penyelundupan, pengguna juga para penjual narkoba yang didapat oleh POLRI dan kemudian setelah melakukan penangkapan serta sudah dilakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut akan di teruskan ke pihak PDRM⁵².

Kemudian, bentuk kerjasama yang kedua adalah, pertukaran data informasi terkait warga negara yang berada diperbatasan yang pernah dan yang sedang terlibat kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sejauh ini kerjasama antara POLRI dan PDRM adalah pada tahap pengembangan kasus, untuk operasi tindakan, dilakukan di masing-masing daerah kekuasaan, contohnya, jika pelaku berada di malaysia, dan pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang sedang

⁵¹ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm.39-40

⁵² Moch Harun Syah. “ *Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia*”. Diakses dari

<https://www.liputan6.com/news/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia> pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.10 WIB

diburon oleh POLRI, maka POLRI akan berkordinasi dengan Atase Polri di Malaysia, dan kemudian Atase melakukan komunikasi dengan PDRM, maka tindakan penangkapan akan dilakukan oleh pihak PDRM⁵³.

Yang ketiga adalah melakukan patroli bersama antara POLRI dan PDRM guna mengawasi para jaringan sindikat narkoba yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil di perbatasan antara kedua negara. Patroli bersama ini juga dilakukan untuk memberantas jalur peredaran narkoba. Patroli ini dilakukan dengan terkoordinasi baik di darat maupun di laut⁵⁴.

Dalam kasus di Kepulauan Riau Kerjasama Polri dan PDRM sebenarnya adalah terusan kerjasama yang dilakukan oleh Mabes Polri sebagai induk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polda Kepulauan Riau adalah kerjasama yang merupakan telah dilakukan oleh pihak Mabes Polri dan pihak PDRM. Hal ini dikarenakan Institusi Polri merupakan Institusi vertikal yang berarti bahwa, apa yang akan dilakukan di tingkat daerah, adalah perintah dari pihak yang berada di Markas Besar⁵⁵.

Dalam hal ini, biasanya tim dari Mabes Polri akan terjun langsung ketika mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang dilakukan, dan akan mengirimkan tim ke daerah terkait. Mabes Polri merupakan pembina bagi Polda-Polda yang ada diseluruh provinsi di Indonesia, Mabes Polri akan mengarahkan,

kemudian menginformasikan dan selanjutnya akan turun langsung ke tempat terjadinya pelanggaran hukum⁵⁶. Dalam melakukan pengawasan terhadap Provinsi Kepulauan Riau akan bahayanya perdagangan lintas batas, Polda Kepulauan Riau tentunya tidak sendiri dalam memberantas kejahatan lintas batas, terutama dalam kasus perdagangan narkoba internasional. Pihak Polda Kepulauan Riau juga melakukan kerjasama dengan pihak PDRM untuk memantau dan mengawasi wilayah perbatasan.

Dalam melakukan kerjasama, kerjasama yang paling menonjol adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Indonesia dengan pihak PDRM, salah satu bentuk kerjasamanya adalah ketika pelaku merupakan WNI dan kemudian melarikan diri ke Malaysia, di Pihak Indonesia memberikan data informasi terkait pelaku, dan kemudian pihak PDRM menindak lanjuti hasil data informasi yang diterima, dan ketika sudah dilakukan penangkapan maka pelaku akan diserahkan ke Pihak Indonesia, bisa dilakukan diperbatasan ataupun mengirimkan tim khusus untuk mengantarkan pelaku terhadap pihak terkait, dan begitupun sebaliknya⁵⁷.

Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan adalah salah satunya rapat kerja yang dilakukan setahun sebanyak 2 sampai 3 kali, didalam rapat tersebut dibahas tentang program-program yang dilakukan di wilayah masing-masing, seperti contohnya tindakan preventif,

⁵³ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm. 46-47

⁵⁴ Wisnu Aditya, Loc.it.,hlm. 46-47

⁵⁵ Kompol Raja Buntat Abas, Kasubag Bin Opsnal Diserse Narkoba Polda Kepri,"Wawancara", 07 Januari 2019 di Mapolda Kepulauan Riau

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

dilakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, kemudian sanksi-sanksi yang diterima apabila melakukan tindak kejahatan yang bersangkutan dengan narkoba terhadap masyarakat.

Selain itu didalam rapat kerja ini juga dilakukan tukar informasi dan pengetahuan seputar isu yang dibahas antar kedua institusi Rapat kerja dilakukan Di Polda Kepulauan Riau sebagai daerah tempat rawan narkoba, tetapi tetap yang melakukan pertemuan adalah perwakilan dari Mabes Polri dan kemudian juga dari pihak Polda Kepulauan Riau⁵⁸.

Dalam kerjasama Polri dan PDRM khususnya di Kepulauan Riau, yang menjadi kendala adalah karena batas negara, tentunya kedua belah pihak tidak bisa bebas dalam melaksanakan operasi, kemudian para bandar narkoba sering menggunakan nama samaran, yang membuat pihak Polri dan PDRM tidak dapat menelusuri lebih jauh.

Contoh lain dari kerjasama Polri dan PDRM adalah dilakukannya patroli bersama diperbatasan, GBC Malindo menjadi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian diteruskan kepada pihak bersangkutan salah satunya Polda Kepulauan Riau. Salah satu isinya adalah patroli bersama di perbatasan⁵⁹.

1. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

Hubungan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia

dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Malaysia tidak terlalu sering terjadi, hal ini dikarenakan biasanya kedua pihak digandeng oleh pihak berwajib masing-masing negara, BNN dengan Polri, dan AAK dengan PDRM.

Tetapi BNN dan AADK merasa harus melakukan kerjasama secara langsung yang dilakukan oleh kedua pihak. Hal ini dibuktikan ketika kunjungan BNN ke kantor AADK di Kuala Lumpur pada tahun 2016, dalam kunjungan ini Indonesia diwakili oleh Drs. Arief Sudiotomo, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN⁶⁰.

Pertemuan selanjutnya yang terbaru adalah pada tahun 2018, Kepala BNN Indonesia Komjen Pol. Drs. Heru Winarko melakukan kunjungan ke dua negara, salah satunya adalah Malaysia, dalam kunjungan ini Kepala BNN melakukan kunjungan dengan didampingi oleh Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama serta seluruh Kepala BNN Provinsi yang daerahnya berada di perbatasan⁶¹.

Pertemuan ini adalah salah satu upaya BNN untuk menanggulangi perdagangan ataupun penyelundupan narkoba di perbatasan. Dalam pertemuannya dengan perwakilan AADK, pihak BNN mendiskusikan beberapa hal, yaitu informasi terkini terkait narkoba, baik pencegahan, pemberantasan, kerjasama, rehabilitasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Dalam pertemuan ini, BNN, NCID, NADA (Agensi

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Wisnu Aditya, Loc.it., hlm. 66

⁶¹ BNN-RI. "Serius Tangani Permasalahan Narkotika Kawasan Perbatasan, Kepala BNN Kunjungi Dua

Negara".Diakses dari <https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/serius-tangani-permasalahan-narkotika-kawasan-perbatasan-kepala-bnn-kunjungi-dua-negara/> pada tanggal 16 Februari 2019 Pukul 23.07 WIB

Antidadah Kebangsaan), dan CNB sepakat untuk memanfaatkan Sekretariat ASEAN Seaport Interdiction Task Force, joint operation, dan kemudian mengadakan rapat kerja⁶².

Khususnya di wilayah Kepulauan Riau, kerjasama yang dilakukan oleh BNN dengan AADK dilakukan berdasarkan terusan kerjasama dari Badan Narkotika Nasional pusat. Karena untuk Bidang Hubungan Kerja Internasional, hanya ada di BNN pusat Hal ini juga dikarenakan BNN merupakan Institusi yang arahnya vertikal, dan pihak BNN Provinsi hanya mengikuti instruksi dari BNN Pusat yang menjadi tanggung jawab mereka⁶³.

Dalam hubungan khusus BNNP Kepulauan Riau, dengan AADK Malaysia hubungan kerjasama yang menjadi prioritas adalah pertukaran data, terkhusus dengan AADK yang berada di Johor Bahru, hal ini dikarenakan, rata-rata barang bukti narkoba masuk melalui Johor Bahru. Informasi yang diterima, kemudian diolah menjadi data intelijen yaitu data A1 (Akurat), setelah mendapat data intelijen, baru dilakukan kordinasi melakukan penurunan personel terkait data yang didapat⁶⁴.

Pertukaran informasi yang kemudian dijadikan data intelijen merupakan kerjasama yang cukup efektif, karena di era saat ini pengungkapan kasus menggunakan IT merupakan salah satu cara yang harus dilakukan, karena disuatu saat para petugas tidak dapat menebak-

nebak dan memberhentikan secara sepihak kapal yang sedang berlayar, karena dapat mengganggu peraturan pelayaran internasional dan juga mengganggu orang asing yang sedang berwisata⁶⁵.

Dengan menggunakan IT maka informasi akan lebih akurat, dan petugas tidak perlu menebak kapal mana yang akan diperiksa, dan juga dengan menggunakan IT, petugas yang berwenang dapat langsung memastikan kapal yang sekiranya melakukan penyelundupan narkoba⁶⁶. Kemudian di tanggal 29-31 Oktober 2017, perwakilan dari Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Johor melakukan kunjungan ke Kepulauan Riau khususnya di Pulau Batam. Para perwakilan AADK Negeri Johor melakukan kunjungan ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Batam⁶⁷.

ALASAN INDONESIA DAN MALAYSIA MELAKUKAN KERJASAMA

Dalam kerjasama yang dilakukan, Indonesia dan Malaysia memiliki alasan yang dijadikan alasan untuk mendapatkan tujuan bersama. Dalam kasus ini, Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa alasan untuk dijadikan alasan dalam membangun kerjasama kedua negara, dan di dalam alasan yang dikemukakan adalah kepentingan nasional dari masing-masing negara

A. Tingginya Peredaran Narkotika di Indonesia dan Malaysia

1. Indonesia

Indonesia merupakan target pasar peredaran narkotika internasional,

⁶² Ibid

⁶³ AKBP Bubung Pramiadi, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau, "Wawancara". 08 Januari 2019 di Kantor BNNP Kepulauan Riau

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Mohd Firdaus Yon. "Belajar Pendekatan Indonesia". Diakses dari <https://www.karangkraf.com/berita/belajar-pendekatan-indonesia-1.750767> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 01.00

dengan jumlah penduduk yang besar, dan meningkatnya perkembangan ekonomi menjadikan Indonesia adalah tempat yang menguntungkan untuk pedagang narkotika internasional. Faktor lainnya adalah semakin diperketatnya peraturan terkait narkoba di negara lain, seperti Filipina dan Cina, yang kemudian para pedagang narkotika internasional mengubah arah pasarnya ke Indonesia⁶⁸.

Perdagangan narkotika internasional di dunia, sebanyak 80% menggunakan jalur laut untuk menyelundupkan narkotika, Indonesia dengan wilayah laut yang lebih luas dibanding daratan, serta faktor-faktor yang telah disebutkan membuat negara Indonesia terus menjadi target para penyelundup narkoba⁶⁹.

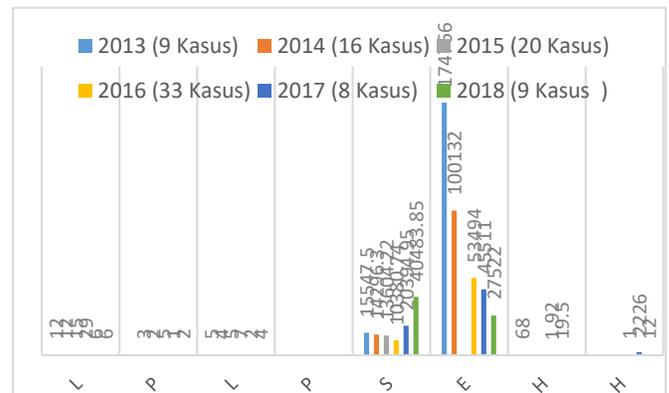
Para pedagang narkotika internasional juga memilih Indonesia karena alasan harga jual narkotika, untuk perbandingan harga, di China dijual seharga Rp.100.000/gram, Taiwan Rp.200.000/gram, sementara di Indonesia untuk ¼ gram, harga berkisar Rp.200.000 hingga Rp.400.000, sehingga harga pergramnya berkisar 1,5 Juta hingga 2 Juta Rupiah⁷⁰.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BNN dan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017, survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba menyebutkan bahwa penyalahgunaan di Indonesia

berjumlah 3,3 Juta jiwa di kelompok usia 10-59 tahun atau dengan persentase 1,77%⁷¹. Jumlah yang telah direhabilitasi adalah 16.554.⁷²

Untuk kasus di Kepulauan Riau, peredaran narkotika cukup menjadi ancaman bagi Indonesia khususnya Riau yang berada di perbatasan secara langsung di Selat Malaka, berikut data kasus dan jumlah barang bukti serta jumlah pelaku peredaran dari Malaysia:

Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus, Tersangka dan Barang Bukti Tindakan Penyelundupan Narkotika Internasional Yang Berasal dari Malaysia



Sumber: Kompol Raja Buntat Abas, Kasubag Bin Opsnal Diserse Narkoba Polda Kepri, "Wawancara", 07 Januari 2019 di Mapolda Kepulauan Riau

2. Malaysia

Malaysia telah menjadikan narkotika sebagai musuh nomor satu di negaranya. Malaysia telah banyak menghabiskan dana untuk melakukan upaya penanganan kejahatan

⁶⁸ Heyder Affan, "Mengapa 'Banjir' Narkoba di Indonesia Terus Meningkat?". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 19.01 WIB

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Nursita Sari. "BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia. Diakses dari

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia> pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 19.15 WIB

⁷¹ BNN, "Indonesia: Narkoba Dalam Angka Tahun 2017". Jurnal Data Puslitdatin, 2017, hal 4

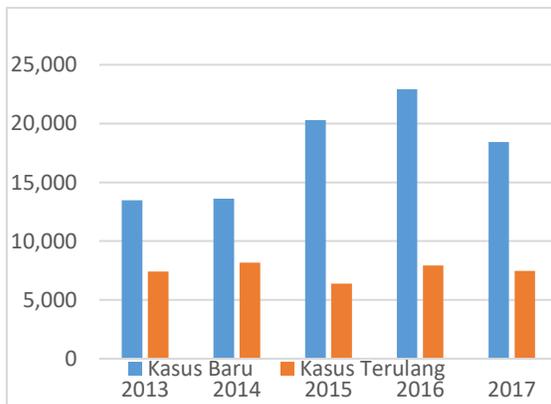
⁷² Ibid

narkotika. Pihak Kerajaan Malaysia juga telah juga menghabiskan cukup besar dana untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu akibat dari pemakaian narkotika⁷³.

Malaysia juga menganggap bahwa narkotika menjadi penghambat untuk kemajuan negara, pihak Malaysia juga gusar karena sering dijadikan tempat transit selain menjadi target pasar para pedagang narkotika internasional. Penyalahgunaan narkotika di Malaysia juga telah merenggut anak-anak dibawah 10 tahun, ini menjadikan narkotika menjadi ancaman serius bagi negara Malaysia khususnya bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)⁷⁴.

Dalam peredaran narkotika di Malaysia mencoba melakukan tindakan preventif untuk mencegah masuknya peredaran narkotika internasional ke Malaysia. Di bawah ini merupakan data peredaran narkotika di negara Malaysia:

Tabel 4.2 Data Pengguna Narkotika di Malaysia dari Tahun ke Tahun Sejak Tahun 2013 hingga 2017



⁷³ Lee Lam Thye. "Tekad Perangi Dadah". Diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/tekad-perangi-dadah-1.353150> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 20.45 WIB

⁷⁴ Ibid

Sumber: AADK Malaysia, "Statistik Dadah". Diakses dari <https://www.adk.gov.my/orang-awam/statistik-dadah/>, pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 20.57

Data kasus yang ada menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, peredaran narkotika meningkat cukup banyak bahkan di tahun 2017, kasus yang terjadi lebih banyak dibanding Indonesia.

B. Dampak Buruk Bagi Ekonomi Indonesia-Malaysia

1. Dampak Terhadap Indonesia

Penyelundupan narkotika serta peredaran di dalam negeri sangat berdampak terhadap perekonomian nasional, karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang ilegal dan tidak terekam di data negara. Kemudian peredaran narkotika juga menjadikan daya beli masyarakat menjadi menurun, karena para pecandu dan pengguna narkotika lebih memilih membeli narkotika dibanding membelanjakan uang yang transaksinya terekam oleh pihak negara⁷⁵.

Para pengguna narkotika sebagian besar merupakan pemuda dan seharusnya pemuda adalah sebagai penopang hidup sebagai tulang punggung untuk meningkatkan perekonomian keluarga atau diri sendiri, dan karena narkotika para pemuda menjadi tidak produktif dan menjadikan diri sebagai sumber kriminal karena membutuhkan uang untuk membeli narkotika⁷⁶

Akibat dari transaksi perdagangan narkotika ilegal,

⁷⁵ Stanly Ravel. "Menkeu: Peredaran Narkotika Ganggu Perekonomian Bangsa". Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkotika-ganggu-perekonomian-bangsa> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.30 WIB

⁷⁶ Ibid

Indonesia memiliki potensi kehilangan pendapatan negara sebesar satu persen secara global⁷⁷. Hal ini kemudian diperkuat dengan data akhir BNN tentang kerugian negara akibat dari narkoba, kerugian ekonomi dan ataupun sosial mencapai angka Rp. 84,7 triliun, dengan rincian kerugian sosial sebesar Rp,77,4 triliun serta kerugian secara pribadi sebesar Rp.7,3 triliun⁷⁸

2. Dampak Terhadap Malaysia

Perekonomian Malaysia tentunya terancam, karena akibat dari kecanduan narkoba adalah akan kekurangannya pemuda yang seharusnya dapat bekerja dalam berbagai sektor didalam negeri. Hal ini kemudian menjadi permasalahan ketika Malaysia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Di karenakan pemuda bangsa tidak lagi dapat berkontribusi akibat dari kecanduan narkoba, Malaysia dengan terpaksa akan menggunakan tenaga Asing dari berbagai negara. Banyaknya pekerja asing juga dapat merugikan perekonomian, karena uang yang dialirkan ke tenaga asing dan akan digunakan oleh tenaga asing di daerah asal⁷⁹.

Selain itu, Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Malaysia dalam sehari, pecandu narkoba di Malaysia dapat menghabiskan uang

sebesar 26 Juta Ringgit, dengan perseorangan dapat menghabiskan sekitar 200 Ringgit sehari dan perkelompok dapat menghabiskan sekitar 500 Ringgit sehari. Dalam kasus ini, transaksi yang dilakukan terhadap pengedar pastinya adalah transaksi yang tidak tercatat didalam sistem negara, berarti transaksi tersebut adalah transaksi yang merugikan negara⁸⁰.

Di Malaysia, dana untuk melakukan rehabilitasi ditentukan perorangan dengan rincian dana uang makan sebesar 8 ringgit, dan untuk biaya lain-lain sebesar 37 ringgit total 45 ringgit. untuk tahun 2017, jumlah yang melakukan rehabilitasi adalah 64.559 orang, dan totalnya adalah 2,9 Juta ringgit perhari, kemudian menjadi 34,8 Juta ringgit pertahun⁸¹.

KESIMPULAN

Kerjasama penanganan masalah kejahatan perdagangan narkoba internasional dilakukan diperbatasan di darat dan lebih terkhususnya di area laut, karena 80% penyelundupan narkoba dilakukan melewati jalur laut. Kemudian daerah yang cukup menjadi perhatian adalah wilayah Kepulauan Riau, karena Kepulauan Riau adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta langsung berhadapan dengan Selat Malaka yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.

⁷⁷ Wilfridus Setu Embu. "Kerugian Akibat Transaksi Narkoba Hanya 1 Persen Secara Global". Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/kerugian-akibat-transaksi-narkoba-hanya-1-persen-secara-global.html> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.46 WIB

⁷⁸ Berita Satu, Loc.it

⁷⁹ Farahwaheda Binti Ab Rahman. "Penyelesaian Penagih Dadah Tegar Dalam Negara Menurut Siasah Syariah". Diakses dari https://www.academia.edu/7848708/Penyelesaian_Penagih_Dadah_Tegar_Dalam_Negara_Menurut_Siasah_Syariah. Pada tanggal 18 Februari 2019 Pukul 01.34 WIB

⁸⁰ Berita Harian. "Penagih M'sia Belanja \$3.15 Bilon Setahun Untuk Dadah". Diakses dari <https://www.beritaharian.sg/dunia/penagih-msia-belanja-315-bilion-setahun-untuk-dadah> . Pada tanggal 18 Februari 2019 Pukul 02.10

⁸¹ AADK Kementerian Dalam Negeri. "Maklumat Dadah 2017". Diakses dari https://www.adk.gov.my/wp-content/uploads/Maklumat-Dadah-2017_final-compressed.pdf pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 02.21 WIB

Khusus di Kepulauan Riau, Polda Kepri dan BNNP Kepulauan Riau sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan kejahatan ini, melakukan kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak pusat, karena kedua lembaga ini merupakan lembaga vertikal yang tugas dan kerjasama dilakukan berdasarkan keputusan dari markas besar di pusat.

Dalam hal ini penulis mendapatkan hasil bahwa Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama karena kedua negara memiliki kepentingan nasional yang sama, yaitu ingin menjadikan negara mereka terbebas dari narkoba. Karena setiap tahun peredaran narkoba di Indonesia dan Malaysia cukup tinggi. Dengan peredaran yang tinggi di kedua negara, membuat Indonesia dan Malaysia terancam krisis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service. Hal 396-397
- BPS Provinsi Kepri.(2010). *Kepulauan Riau dalam Angka 2010*. Kepulauan Riau: BPS Provinsi Kepulauan Riau. Hal.3
- Elisabeth, Adriana, et al. (2011) *Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.142-143
- Jackson, Robert.,and Georg Sorensen. (1999) *. Introduction to International Relations*. Oxford University Press Inc. Pg.2
- Jatmika, Sidik. (2016). *Skripsi Metodologi dan Romantikanya*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Maksum, Ali.(2017) *“Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia”*. Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta. hlm. 13
- Mochtar Kusumaatmadja.(1982). *Pengantar Hukum Internasional*. BinaCipta:Bandung

SDM, karena pengguna narkoba mayoritas berada di usia produktif dan dapat membuat mereka menjadi pencandu dan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan akan berakhir pemecatan.

Selain itu dalam bidang ekonomi, narkoba memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menyebabkan kerugian negara karena pertama, narkoba ditransaksi dengan uang resmi tetapi tidak tercatat di negara, hal ini yang kemudian membuat negara mengalami kerugian secara ekonomi. Kedua karena setiap pecandu yang ditangkap ataupun menyerahkan diri, akan dimasukkan kedalam rumah rehabilitasi yang berarti negara membutuhkan biaya untuk dapat mengakomodasi setiap pecandu yang akan di rehabilitasi.

Morgenthau, H.J.(1951).” *In Defence of The National Interest : A Critical Examination of American Foreign Policy*.(New York:Universiti Press of America)

Muhammad, Ali., dan Ali Maksum. (2016). *Keamanan Asia Tenggara*.

Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal.4-5 Winarno,

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. Hal.83

Jurnal

Adirini Pujayanti.(2015) *“Arah Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia di Masa Pemerintahan Jokowi”*. Jurnal Info Singkat HI DPR, Vol VII, No. 031/I/P/P3DI, hal. 3-8

Ali Maksum.(2017) *“Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi”*. Jurnal PIR, Vol.2,No.1

BNN, *“Indonesia: Narkoba Dalam Angka Tahun 2017”*. Jurnal Data Puslitdatin, 2017, hal 4

Mohammad Rosyidin.(2014). “*Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010*”. Jurnal Kajian Wilayah LIPI, Vol. 5, No.1,hal 3

Simela Victor Muhamad. 2015. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*. Jurnal P3DI Setjen DPR RI. diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241> pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 22.46 WIB

Sri Rahayu Ningsih. 2018. *Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau)*. Jurnal Online Mahasiswa UNRI. Vol 5 Hal. 8

SKRIPSI :

Wisnu Aditya, Skripsi : “*Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba*” (Yogyakarta: UPN Yogyakarta, 2017), Hal. 35

Website

AADK Kementerian Dalam Negeri. “*Maklumat Dadah 2017*”. Diakses dari https://www.adk.gov.my/wp-content/uploads/Maklumat-Dadah-2017_final-compressed.pdf pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 02.21 WIB

Ade P Nasution, “*Profil Provinsi Kepulauan Riau*” diakses dari <http://adenasution.com/2012/05/29/profil-provinsi-kepulauan-riau/> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.59 WIB

BNN-RI. “*Serius Tangani Permasalahan Narkotika Kawasan Perbatasan, Kepala BNN Kunjungi Dua Negara*”. Diakses dari [\[kawasan-perbatasan-kepala-bnn-kunjungi-dua-negara/\]\(https://www.bnn.go.id/kawasan-perbatasan-kepala-bnn-kunjungi-dua-negara/\) pada tanggal 16 Februari 2019 Pukul 23.07 WIB](https://bnn.go.id/blog/beritakegiatan/serius-tangani-permasalahan-narkotika-</p></div><div data-bbox=)

Faqih Luthfi “*Konsepsi Kejahatan Transnasional & Jenis-Jenis Kejahatan Transnasional*” diakses dari <http://www.calonsh.com/2016/11/06/konsepsi-kejahatan-transnasional-jenis-jenis-kejahatan-transnasional#> tanggal 26 September 2018 pukul 02.48 WIB

Farahwaheda Binti Ab Rahman. “*Penyelesaian Penagih Dadah Tegar Dalam Negara Menurut Siasah Syariah*”. Diakses dari https://www.academia.edu/7848708/Penyelesaian_Penagih_Dadah_Tegar_Dalam_Negara_Menurut_Siasah_Syariah. Pada tanggal 18 Februari 2019 Pukul 01.34 WIB

Kemenlu, “*Kejahatan Lintas Negara*” Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>. Pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 02.55 WIB

Kementerian Dalam Negeri Malaysia. “*Pelan Strategik Kementerian Dalam Negeri 2015-2020*”. Diakses dari http://www.moha.gov.my/images/penerbitan/PELAN_STRATEGIK_KDN/PELAN_STRATEGIK_KDN_2015-2020.pdf pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 09.35 WIB

Mohd Firdaus Yon. “*Belajar Pendekatan Indonesia*”. Diakses dari <https://www.karangkraf.com/berita/belajar-pendekatan-indonesia-1.750767> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 01.00

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “*Malaysia-Indonesia Miliki Hubungan Sejarah Kuat*”. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesia-miliki-hubungan-sejarah->

kuat/#more-2682 Pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 23.22 WIB

Vinsensius Richard Liu. 2013. *Efektifitas Interpol Dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika DiIndonesia*. REPOSITORY UNHAS. diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4799/jurnal.docx?sequence=1> pada tanggal 26 September 2018 pukul 12.45

Website resmi pemerintah Indonesia “*Geografis Indonesia*” Diakses dari http://indonesia.go.id/?page_id=479 pada tanggal 25 september 2018 pukul 22.05 WIB

Berita

Akhmad Muawal Hasan. “*Gara-Gara Malaysia, Indonesia Keluar dari PBB*” . diakses dari <https://tirto.id/gara-gara-malaysia-indonesia-keluar-dari-pbb-cCpg> pada tanggal 15 Februari pukul 19.53 WIB

Anne Maria “*Diupah 60 Juta, Kurir Nekat Bawa Sabu 20,5 Kg dari Malaysia ke Nongsa*” . diakses dari <http://batam.tribunnews.com/2016/11/03/diupah-60-juta-kurir-nekat-bawa-sabu-205-kg-dari-malaysia-ke-nongsa-begini-kronologi-kejadiannya?page=2>. Pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul Pukul 01.18 WIB.

Angga Indrawan, “*Kasus Narkotika di Kepri Meningkat*” Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/03/o6lyqe365-kasus-narkotika-di-kepri-meningkat> pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 03.40 WIB.

Arga Sumantri, “*Indonesia-Malaysia Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang*” diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/asia/5b25XlaN-indonesia-malaysia-tingkatkan-kerja-sama-di-berbagai-bidang>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 23.45 WIB.

BBC. “*Indonesia dan Malaysia Kawal Kerjasama Strategis*”. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131219_ri_malaysia_pertemuan pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 23.08 WIB

Berita Satu. “*1,77% Penduduk Gunakan Narkotika, Kerugian Rp. 84,7 Triliun*”. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/483883-177-penduduk-gunakan-narkotika-kerugian-rp-847-triliun.html> pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 00.21 WIB

Berita Harian. “*Penagih M’sia Belanja \$3.15 Bilon Setahun Untuk Dadah*”. Diakses dari <https://www.beritaharian.sg/dunia/penagih-msia-belanja-315-bilion-setahun-untuk-dadah> . Pada tanggal 18 Februari 2019 Pukul 02.10

Detik News. “*RI-Malaysia Sepakati Kerjasama di Segala Bidang*”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/517625/ri-malaysia-sepakati-kerjasama-di-segala-bidang> pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 22.39 WIB

Heyder Affan, “*Mengapa ‘Banjir’ Narkotika di Indonesia Terus Meningkat?*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 19.01 WIB

Hadi Maulana “*BNN Kepri Amankan 2,5 Kilogram Sabu Asal Malaysia yang Dibawa TKI*”,diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/03/22/16384861/bnn-kepri-amankan-25-kilogram-sabu-asal-malaysia-yang-dibawa-tki>, pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 01.19 WIB.

Ivan Aulia Ahsan. “*Soeharto-Mahathir: Kemesraan Antara Indonesia-Malaysia*” .diakses dari <https://tirto.id/soeharto-mahathir->

kemesraan-antara-indonesia-malaysia-cu4R pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 21.10 WIB

Khairudin Mohdz Zain. “Ubah Strategi Tangani Dadah” . Diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/ubah-strategi-tangani-dadah-1.332911> pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 09.30 WIB

LeeLam Thye. “ Tekad Perangi Dadah”. Diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/tekad-perangi-dadah-1.353150> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 20.45 WIB

Moch Harun Syah. “ Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia”. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia> pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.10 WIB

Nursita Sari. “BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia> pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 19.15 WIB

Stanly Ravel. “Menkeu: Peredaran Narkoba Ganggu Perekonomian Bangsa”. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkoba-ganggu-perekonomian-bangsa> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.30 WIB

Susanto Pudjomartono. “Ganyang Malaysia?”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/08/08135067/Ganyang.Malaysia>

pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 19.16 WIB

Utusan Online, “Strategi Lebih Berkesan Perangi Dadah” diakses dari <http://www.utusan.com.my/rencana/utama/strategi-lebih-berkesan-perangi-dadah-1.199008> pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 07.30 WIB

Wilfridus Setu Embu. “Kerugian Akibat Transaksi Narkoba Hanya 1 Persen Secara Global”. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/kerugian-akibat-transaksi-narkoba-hanya-1-persen-secara-global.html> pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 21.46 WIB

WAWANCARA (DATA PRIMER)

Kompol Raja Buntat Abas, Kasubag Bin Opsnal Diserse Narkoba Polda Kepri,”Wawancara”, 07 Januari 2019 di Mapolda Kepulauan Riau

AKBP Bubung Pramiadi, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepulauan Riau,”Wawancara”. 08 Januari 2019 di Kantor BNNP Kepulauan Riau